HISTORIOGRAFI ORDE BARU: KONSTRUKSI SEJARAH NASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN LEGITIMASI KEKUASAAN TAHUN 1966–1998

Abdul Haris Prayitno[1], Etmi Hardi[2], Rahmuliani Fitriah[3]

[1,2,3]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : franahp8@gmail.com

ABSTRACT

Historiography during the New Order era was one of the important instruments used by the government to build political legitimacy and maintain the stability of power. Through centralized and state-controlled history writing, the New Order government attempted to shape the public's understanding of the journey of the Indonesian nation in accordance with the political interests of the ruling regime. This research aims to analyze how the construction of national history during the New Order era was used as a tool to legitimize power during the 1966–1998 period. The method used is a historical research method with a library study approach through analysis of various books, journals, documents and relevant historical sources. The results of the research show that the New Order government reinterpreted various historical events, especially those related to the 30 September 1965 Movement, the national struggle, and the role of the military in national and state life. The historical narrative that is constructed places the government and military as saviors of the nation from the threat of communism as well as being the basis of legitimacy for the regime's continued power. New Order historiography also functions as a means of forming national identity through education, mass media, and various state cultural products. Thus, history not only functions as a reconstruction of the past, but also as a political tool in shaping the collective consciousness of society.

Keywords : *Historiography, New Order, National History, Legitimacy Of Power, Historical Politics.*

ABSTRAK

Historiografi pada masa Orde Baru merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk membangun legitimasi politik dan mempertahankan stabilitas kekuasaan. Melalui penulisan sejarah yang terpusat dan dikendalikan oleh negara, pemerintah Orde Baru berupaya membentuk pemahaman masyarakat mengenai perjalanan bangsa Indonesia sesuai dengan kepentingan politik rezim yang berkuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi sejarah nasional pada masa Orde Baru digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan selama periode 1966–1998. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis berbagai buku, jurnal, dokumen, dan sumber-sumber sejarah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru melakukan reinterpretasi terhadap berbagai peristiwa sejarah, terutama terkait peristiwa Gerakan 30 September 1965, perjuangan nasional, dan peran militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Narasi sejarah yang dibangun menempatkan pemerintah dan militer sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunisme sekaligus menjadi dasar legitimasi bagi keberlangsungan kekuasaan rezim. Historiografi Orde Baru juga berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas nasional melalui pendidikan, media massa, dan berbagai produk budaya negara. Dengan demikian, sejarah tidak hanya berfungsi sebagai rekonstruksi masa lalu, tetapi juga sebagai alat politik dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat.

Kata Kunci : *Historiografi, Orde Baru, Sejarah Nasional, Legitimasi Kekuasaan, Politik Sejarah*.

PENDAHULUAAN

Sejarah merupakan salah satu instrumen penting dalam pembentukan identitas bangsa dan kesadaran kolektif masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana untuk memahami masa lalu, sejarah juga sering digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk membangun legitimasi politik dan mempertahankan kekuasaan. Dalam berbagai negara, termasuk Indonesia, penulisan sejarah tidak selalu bersifat netral karena sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, ideologi, dan kekuasaan yang sedang dominan. Pada masa Orde Baru (1966–1998), pemerintah di bawah kepemimpinan Soeharto menjadikan sejarah sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun stabilitas politik dan memperkuat legitimasi rezim. Melalui berbagai kebijakan pendidikan, penerbitan buku sejarah resmi, media massa, film, serta berbagai kegiatan kenegaraan, pemerintah membentuk narasi sejarah nasional yang menempatkan Orde Baru sebagai penyelamat bangsa dari ancaman disintegrasi dan komunisme. Narasi tersebut kemudian disebarluaskan secara sistematis kepada masyarakat sehingga membentuk pemahaman sejarah yang relatif seragam selama lebih dari tiga dekade.

Konstruksi sejarah nasional pada masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang berkembang setelah peristiwa Gerakan 30 September. Peristiwa tersebut menjadi titik awal lahirnya pemerintahan Orde Baru yang berupaya membangun legitimasi politik melalui berbagai cara, termasuk penguasaan terhadap narasi sejarah. Pemerintah menampilkan dirinya sebagai kekuatan yang berhasil menyelamatkan negara dari ancaman komunisme dan menjaga keutuhan bangsa. Dalam proses tersebut, berbagai peristiwa sejarah ditafsirkan kembali sesuai dengan kepentingan politik negara. Penulisan sejarah nasional kemudian tidak hanya berfungsi sebagai upaya merekonstruksi masa lalu, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai politik yang mendukung keberlangsungan kekuasaan. Akibatnya, sejarah berkembang menjadi alat ideologis yang berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap masa lalu dan realitas politik yang sedang berlangsung.

Kajian mengenai historiografi Orde Baru telah banyak dilakukan oleh para sejarawan dan ilmuwan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Asvi Warman Adam menunjukkan bahwa penulisan sejarah pada masa Orde Baru cenderung bersifat negara-sentris dan menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam perjalanan sejarah bangsa. Kajian lain yang dilakukan oleh Benedict Anderson menyoroti bagaimana negara membangun memori kolektif melalui kontrol terhadap pendidikan dan media. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh John Roosa mengungkap adanya berbagai interpretasi alternatif terhadap peristiwa 1965 yang berbeda dengan versi resmi pemerintah Orde Baru. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada peristiwa politik tertentu atau kontroversi sejarah 1965. Kajian yang secara khusus membahas historiografi Orde Baru sebagai instrumen legitimasi kekuasaan dalam kerangka sejarah nasional secara menyeluruh masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara historiografi dan kekuasaan selama masa Orde Baru.

Penelitian ini menggunakan teori historiografi dan teori hegemoni sebagai landasan analisis. Historiografi dipahami sebagai proses penulisan dan penyusunan sejarah yang tidak terlepas dari konteks sosial, politik, dan budaya tempat sejarah tersebut ditulis. Menurut Kuntowijoyo, historiografi merupakan rekonstruksi masa lalu yang disusun berdasarkan interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah. Sementara itu, teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan

politik dan militer, tetapi juga melalui penguasaan ideologi dan pembentukan kesadaran masyarakat. Dalam konteks Orde Baru, historiografi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk hegemoni budaya yang digunakan negara untuk membangun persetujuan masyarakat terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Melalui pendidikan, media massa, dan berbagai institusi sosial lainnya, negara berupaya menanamkan interpretasi sejarah tertentu yang mendukung legitimasi rezim.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami hubungan antara sejarah dan kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman tersebut menjadi semakin relevan karena sejarah tidak hanya berfungsi sebagai catatan masa lalu, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan identitas nasional, memori kolektif, dan kesadaran politik masyarakat. Dengan mengkaji historiografi Orde Baru, penelitian ini dapat membantu menjelaskan bagaimana suatu rezim politik menggunakan sejarah sebagai instrumen legitimasi serta bagaimana narasi sejarah dapat memengaruhi cara masyarakat memahami masa lalu. Selain itu, kajian ini juga penting untuk mendorong berkembangnya historiografi yang lebih kritis, objektif, dan terbuka terhadap berbagai perspektif sejarah.

Penelitian ini berfokus pada analisis konstruksi sejarah nasional yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru selama periode 1966–1998 serta bagaimana konstruksi tersebut digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Fokus kajian meliputi kebijakan penulisan sejarah nasional, peran pendidikan sejarah, penggunaan media massa dan film sebagai sarana penyebaran narasi sejarah resmi, serta representasi peran militer dan pemerintah dalam berbagai karya historiografi pada masa Orde Baru. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak dari konstruksi sejarah tersebut terhadap pembentukan memori kolektif masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai historiografi Indonesia, sejarah politik, serta hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam studi sejarah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, peneliti, pendidik, dan masyarakat umum dalam memahami karakteristik historiografi Orde Baru dan pengaruhnya terhadap perkembangan kesadaran sejarah masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya pemikiran yang lebih kritis terhadap berbagai narasi sejarah sehingga masyarakat mampu memahami sejarah secara lebih objektif, plural, dan berdasarkan berbagai perspektif yang tersedia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (historis) dengan pendekatan kualitatif. Metode sejarah dipilih karena penelitian berfokus pada kajian mengenai historiografi Orde Baru dan konstruksi sejarah nasional sebagai instrumen legitimasi kekuasaan selama periode 1966–1998. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana negara melalui berbagai kebijakan dan produk historiografi membangun narasi sejarah tertentu yang digunakan untuk memperkuat legitimasi politik rezim Orde Baru. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini menekankan pada analisis makna, interpretasi, dan pemahaman terhadap berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan penulisan sejarah pada masa Orde Baru.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi pemerintah Orde Baru, buku-buku sejarah nasional yang diterbitkan negara, kurikulum pendidikan sejarah, pidato-pidato kenegaraan, arsip kebijakan

pendidikan, serta berbagai produk budaya yang berkaitan dengan konstruksi sejarah nasional, seperti film dokumenter dan film propaganda. Salah satu sumber yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah buku *Sejarah Nasional Indonesia* yang disusun di bawah pengawasan pemerintah serta film propaganda *Pengkhianatan G30S/PKI* yang selama masa Orde Baru menjadi media utama dalam penyebaran narasi sejarah resmi negara. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai kajian akademik yang membahas historiografi Indonesia, politik sejarah, memori kolektif, serta hubungan antara sejarah dan kekuasaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian dari perpustakaan, arsip digital, jurnal ilmiah, serta koleksi dokumen sejarah yang tersedia baik secara cetak maupun elektronik. Seluruh sumber yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis, periode, dan relevansinya terhadap fokus penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai proses konstruksi sejarah nasional pada masa Orde Baru serta berbagai kebijakan yang mendukung penyebaran narasi sejarah resmi negara.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tahapan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama adalah heuristik, yaitu kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan historiografi Orde Baru. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi berbagai dokumen resmi, buku sejarah, arsip pendidikan, karya ilmiah, serta sumber-sumber lain yang dapat memberikan informasi mengenai proses penulisan sejarah nasional selama masa Orde Baru. Pengumpulan sumber dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan relevansi sumber terhadap fokus penelitian.

Tahap kedua adalah kritik sumber yang bertujuan untuk menguji validitas dan kredibilitas sumber yang telah dikumpulkan. Kritik sumber dilakukan melalui dua tahap, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai keaslian sumber, meliputi identifikasi penulis, waktu penerbitan, lembaga penerbit, serta konteks historis ketika sumber tersebut diterbitkan. Kritik internal dilakukan untuk menilai isi sumber dengan cara menguji konsistensi informasi, objektivitas penulis, serta kemungkinan adanya bias ideologis dan politik dalam narasi yang disajikan. Tahap ini sangat penting mengingat banyak sumber sejarah pada masa Orde Baru diproduksi dalam konteks dominasi negara terhadap penulisan sejarah nasional.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh dan diverifikasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisis hubungan antara kebijakan historiografi negara dengan kepentingan legitimasi politik Orde Baru. Berbagai fakta sejarah yang ditemukan kemudian dihubungkan dengan teori historiografi, teori hegemoni, dan konsep politik memori untuk memahami bagaimana sejarah digunakan sebagai instrumen kekuasaan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakangi lahirnya berbagai narasi sejarah resmi pada masa Orde Baru.

Tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini, hasil interpretasi terhadap sumber-sumber sejarah disusun secara sistematis dan kronologis dalam bentuk karya ilmiah. Penulisan dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, argumentasi ilmiah, dan penggunaan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui proses historiografi, peneliti merekonstruksi bagaimana pemerintah Orde Baru membangun sejarah nasional sebagai instrumen legitimasi kekuasaan serta menjelaskan dampaknya terhadap pembentukan memori kolektif masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan proses

penulisan sejarah pada masa Orde Baru, tetapi juga menjelaskan hubungan antara historiografi, ideologi negara, dan praktik kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama periode 1966–1998.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa historiografi pada masa Orde Baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi politik negara dalam membangun, mempertahankan, dan mereproduksi legitimasi kekuasaan selama periode 1966–1998. Dalam konteks ini, sejarah tidak hanya dipahami sebagai upaya ilmiah untuk merekonstruksi masa lalu berdasarkan fakta-fakta historis, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang digunakan untuk membentuk cara pandang masyarakat terhadap negara, kekuasaan, dan identitas nasional. Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa penguasaan terhadap narasi sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun legitimasi politik, karena sejarah mampu membentuk memori kolektif masyarakat dan menentukan bagaimana suatu rezim dipersepsikan oleh generasi yang hidup pada masa tersebut maupun generasi berikutnya. Oleh karena itu, historiografi menjadi salah satu bidang yang memperoleh perhatian serius dari negara melalui pengendalian terhadap pendidikan, media massa, penerbitan, penelitian sejarah, serta berbagai institusi kebudayaan.

Dalam perspektif historiografi modern, sejarah bukanlah representasi objektif yang sepenuhnya bebas dari kepentingan. Penulisan sejarah selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakangi lahirnya suatu karya sejarah. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault yang menjelaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Foucault (1980), setiap rezim kekuasaan berusaha membentuk "rezim kebenaran" yang menentukan pengetahuan apa yang dianggap benar dan layak diterima oleh masyarakat. Dalam konteks Orde Baru, historiografi menjadi bagian dari rezim kebenaran tersebut. Negara tidak hanya mengontrol institusi politik, tetapi juga mengendalikan produksi pengetahuan sejarah sehingga masyarakat menerima interpretasi tertentu mengenai masa lalu sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan.

Penelitian menemukan bahwa setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Lama, pemerintah Orde Baru menghadapi tantangan besar dalam memperoleh legitimasi politik. Berbeda dengan pemerintahan yang lahir melalui proses pemilihan demokratis yang mapan, Orde Baru muncul dari situasi politik yang penuh ketidakstabilan setelah peristiwa G30S 1965. Oleh karena itu, rezim baru memerlukan dasar legitimasi yang kuat untuk memperoleh dukungan masyarakat. Salah satu strategi yang digunakan adalah membangun narasi sejarah yang menggambarkan Orde Baru sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunisme, konflik politik, dan krisis nasional. Narasi tersebut kemudian menjadi fondasi utama dalam historiografi resmi negara selama lebih dari tiga dekade.

Konstruksi sejarah nasional pada masa Orde Baru sangat menekankan konsep stabilitas politik dan pembangunan nasional. Pemerintah berusaha menampilkan dirinya sebagai kekuatan yang berhasil membawa Indonesia keluar dari kondisi chaos menuju era pembangunan yang berkelanjutan. Dalam berbagai buku sejarah, pidato kenegaraan, dan materi pendidikan, masa Orde Lama sering digambarkan sebagai periode yang penuh ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi. Sebaliknya, Orde Baru dipresentasikan sebagai rezim yang berhasil memulihkan keamanan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat persatuan nasional. Menurut McGregor (2007), narasi sejarah semacam ini merupakan bagian dari upaya

negara untuk menciptakan legitimasi historis, yaitu legitimasi yang dibangun melalui interpretasi terhadap masa lalu.

Salah satu aspek yang paling dominan dalam historiografi Orde Baru adalah konstruksi narasi mengenai peristiwa G30S 1965. Penelitian menunjukkan bahwa peristiwa tersebut dijadikan titik sentral dalam pembentukan identitas politik rezim. Dalam versi resmi negara, Partai Komunis Indonesia (PKI) diposisikan sebagai aktor tunggal yang bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Sementara itu, militer di bawah kepemimpinan Soeharto digambarkan sebagai kekuatan patriotik yang berhasil menyelamatkan bangsa dari ancaman komunisme. Narasi ini tidak hanya diajarkan dalam pendidikan formal, tetapi juga disebarluaskan melalui film, buku, museum, monumen, media cetak, dan berbagai kegiatan kenegaraan. Menurut Roosa (2006), interpretasi resmi mengenai G30S yang berkembang selama masa Orde Baru cenderung mengabaikan kompleksitas politik yang melatarbelakangi peristiwa tersebut dan lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dibandingkan sebagai penjelasan sejarah yang komprehensif.

Dominasi narasi negara mengenai peristiwa G30S menunjukkan bagaimana historiografi digunakan sebagai instrumen politik memori. Politik memori merupakan upaya suatu rezim untuk mengontrol cara masyarakat mengingat masa lalu melalui seleksi, penekanan, dan penghilangan fakta-fakta tertentu. Dalam kasus Orde Baru, negara secara aktif membangun memori kolektif mengenai bahaya komunisme dan pentingnya peran militer dalam menjaga keutuhan bangsa. Film *Pengkhianatan G30S/PKI* menjadi salah satu instrumen yang paling efektif dalam proses tersebut. Film ini tidak hanya menyampaikan informasi sejarah, tetapi juga membentuk emosi, persepsi, dan identitas politik masyarakat. Menurut Heryanto (2006), film tersebut berfungsi sebagai alat pedagogis negara yang bertujuan menciptakan kesadaran sejarah yang sesuai dengan kepentingan rezim.

Selain peristiwa G30S, penelitian juga menemukan bahwa historiografi Orde Baru memberikan posisi yang sangat dominan kepada militer dalam perjalanan sejarah Indonesia. Berbagai peristiwa penting dalam sejarah nasional, mulai dari perjuangan kemerdekaan, revolusi fisik, penumpasan pemberontakan, hingga pembangunan nasional, selalu menempatkan militer sebagai aktor utama. Kontribusi kelompok sipil, organisasi masyarakat, perempuan, kelompok buruh, petani, maupun kelompok minoritas sering kali mendapatkan perhatian yang jauh lebih kecil. Menurut Crouch (2007), penonjolan peran militer dalam historiografi Orde Baru merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat legitimasi doktrin Dwifungsi ABRI yang menjadi salah satu pilar utama kekuasaan rezim.

Doktrin Dwifungsi ABRI menyatakan bahwa militer memiliki peran ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan sekaligus sebagai kekuatan sosial politik. Agar doktrin tersebut diterima oleh masyarakat, negara memerlukan legitimasi historis yang menunjukkan bahwa militer memang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Historiografi kemudian digunakan untuk membangun legitimasi tersebut. Dengan menampilkan militer sebagai penyelamat bangsa dalam berbagai periode sejarah, masyarakat diarahkan untuk menerima keterlibatan militer dalam kehidupan politik sebagai sesuatu yang wajar dan sah. Dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, praktik ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan instrumen budaya untuk memperoleh persetujuan masyarakat tanpa harus selalu mengandalkan penggunaan kekuatan represif.

Penggunaan pendidikan sebagai sarana penyebaran historiografi resmi merupakan temuan penting lainnya dalam penelitian ini. Selama masa Orde Baru, kurikulum sejarah dirancang secara

terpusat dan berlaku seragam di seluruh Indonesia. Buku-buku sejarah yang digunakan di sekolah telah melalui proses seleksi yang ketat sehingga hanya memuat interpretasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pendidikan sejarah tidak diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, melainkan untuk menanamkan nilai-nilai ideologis yang mendukung stabilitas politik dan pembangunan nasional. Menurut Hasan (2012), pendidikan sejarah pada masa Orde Baru lebih berorientasi pada pembentukan loyalitas terhadap negara dibandingkan pengembangan kesadaran historis yang kritis.

Melalui pendidikan, negara berhasil membentuk generasi yang memiliki pemahaman sejarah sesuai dengan narasi resmi pemerintah. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang tumbuh pada masa Orde Baru mengenal sejarah bangsa melalui buku pelajaran yang menekankan bahaya komunisme, pentingnya stabilitas politik, dan keberhasilan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Soeharto. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai sarana reproduksi ideologi negara.

Di samping pendidikan, negara juga memanfaatkan berbagai institusi budaya untuk memperkuat historiografi resmi. Museum, monumen, peringatan hari-hari besar nasional, dan upacara kenegaraan digunakan sebagai media untuk menanamkan memori kolektif tertentu kepada masyarakat. Monumen Pancasila Sakti, misalnya, dibangun sebagai simbol kemenangan negara atas komunisme dan menjadi ruang memori yang memperkuat narasi resmi mengenai peristiwa G30S. Menurut Nora (1989), tempat-tempat semacam itu dapat dipahami sebagai *lieux de mémoire* atau situs memori yang berfungsi menjaga dan mereproduksi ingatan kolektif suatu masyarakat. Dalam konteks Orde Baru, situs-situs memori tersebut digunakan untuk memperkuat legitimasi politik negara.

Namun demikian, dominasi negara dalam historiografi juga menghasilkan berbagai eksklusi sejarah. Banyak kelompok masyarakat yang tidak memperoleh representasi yang memadai dalam sejarah nasional. Korban kekerasan politik tahun 1965, kelompok oposisi, aktivis prodemokrasi, serta berbagai komunitas lokal sering kali tidak mendapatkan ruang dalam narasi resmi negara. Sejarah yang ditulis negara lebih banyak berfokus pada elite politik, militer, dan institusi pemerintahan. Akibatnya, historiografi Orde Baru cenderung bersifat negara-sentris dan mengabaikan keragaman pengalaman historis masyarakat Indonesia. Menurut Adam (2018), salah satu kelemahan utama historiografi Orde Baru adalah kecenderungannya untuk menampilkan sejarah sebagai narasi tunggal yang tidak memberikan ruang bagi suara-suara alternatif.

Berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998 membuka peluang bagi munculnya historiografi yang lebih kritis dan pluralistik. Reformasi memungkinkan para sejarawan untuk mengakses arsip yang sebelumnya tertutup serta mengembangkan berbagai interpretasi baru mengenai sejarah Indonesia. Berbagai kajian mengenai peristiwa 1965, peran militer, pelanggaran hak asasi manusia, dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan mulai berkembang secara luas. Perubahan ini menunjukkan bahwa historiografi merupakan bidang yang selalu terbuka terhadap reinterpretasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa historiografi Orde Baru merupakan instrumen strategis yang digunakan negara untuk membangun legitimasi kekuasaan melalui penguasaan terhadap memori kolektif masyarakat. Melalui kontrol atas pendidikan, media massa, institusi budaya, dan penulisan sejarah nasional, pemerintah berhasil membentuk narasi resmi yang menempatkan Orde Baru sebagai penyelamat bangsa sekaligus aktor utama pembangunan nasional. Historiografi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai rekonstruksi masa lalu, tetapi juga sebagai alat ideologis yang mendukung hegemoni

negara. Oleh karena itu, kajian terhadap historiografi Orde Baru menjadi penting untuk memahami bagaimana sejarah dapat digunakan sebagai instrumen kekuasaan dan bagaimana narasi sejarah memengaruhi pembentukan identitas serta kesadaran politik masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa historiografi pada masa Orde Baru (1966–1998) merupakan bagian penting dari strategi politik negara dalam membangun dan mempertahankan legitimasi kekuasaan. Melalui penguasaan terhadap penulisan sejarah, kurikulum pendidikan, media massa, film, museum, dan berbagai institusi budaya, pemerintah Orde Baru berhasil membentuk narasi sejarah nasional yang menempatkan rezim sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunisme serta sebagai penggerak utama stabilitas dan pembangunan nasional. Konstruksi sejarah tersebut menunjukkan bahwa historiografi tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi yang berkembang pada masanya. Dominasi narasi resmi negara menyebabkan munculnya sejarah yang bersifat negara-sentris, menonjolkan peran militer dan pemerintah, serta membatasi ruang bagi perspektif alternatif dan pengalaman kelompok-kelompok yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Meskipun historiografi Orde Baru berhasil membangun memori kolektif yang mendukung stabilitas politik, praktik tersebut juga menghasilkan penyederhanaan terhadap berbagai peristiwa sejarah dan menghambat berkembangnya pemikiran historis yang kritis. Oleh karena itu, disarankan kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran sejarah yang lebih kritis, analitis, dan multiperspektif sehingga peserta didik mampu memahami sejarah secara objektif. Bagi para sejarawan dan peneliti, perlu terus dilakukan kajian yang mendalam terhadap berbagai sumber sejarah untuk menghadirkan interpretasi yang lebih komprehensif dan inklusif. Sementara itu, pemerintah dan lembaga kebudayaan perlu mendukung keterbukaan arsip sejarah serta mendorong pengembangan historiografi yang demokratis agar sejarah tidak lagi menjadi alat legitimasi kekuasaan semata, melainkan menjadi sarana pembelajaran yang mampu memperkuat kesadaran sejarah, nilai demokrasi, dan identitas kebangsaan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T. (2010). *Indonesia dalam arus sejarah*. Ichtiar Baru van Hoeve.

Adam, A. W. (2009). *Membongkar manipulasi sejarah: Kontroversi pelaku dan peristiwa*. Kompas.

Adam, A. W. (2018). *Beberapa catatan tentang historiografi Indonesia*. Ombak.

Anderson, B. R. O'G. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso.

Anderson, B. R. O'G., & McVey, R. T. (2009). *A preliminary analysis of the October 1, 1965 coup in Indonesia*. Equinox Publishing.

Cribb, R. (Ed.). (1990). *The Indonesian killings of 1965–1966: Studies from Java and Bali*. Monash University Centre of Southeast Asian Studies.

Crouch, H. (2007). *The army and politics in Indonesia*. Equinox Publishing.

Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.

Gottschalk, L. (2008). *Mengerti sejarah* (Nugroho Notosusanto, Trans.). UI Press.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
Hasan, S. H. (2012). Pendidikan sejarah untuk memperkuat pendidikan karakter. *Paramita: Historical Studies Journal, 22*(1), 81–95.
Heryanto, A. (2006). *State terrorism and political identity in Indonesia: Fatally belonging*. Routledge.
Heryanto, A. (2014). *Identity and pleasure: The politics of Indonesian screen culture*. NUS Press.
Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
Kartodirdjo, S. (2014). *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia*. Ombak.
Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
Kuntowijoyo. (2018). *Metodologi sejarah* (Edisi revisi). Tiara Wacana.
Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
Liddle, R. W. (1996). *Leadership and culture in Indonesian politics*. Allen & Unwin.
McGregor, K. E. (2007). *History in uniform: Military ideology and the construction of Indonesia's past*. NUS Press.
Nordholt, H. S., & Van Klinken, G. (Eds.). (2007). *Politik lokal di Indonesia*. KITLV-Jakarta.
Notosusanto, N. (1975). *Sejarah nasional Indonesia Jilid VI*. Balai Pustaka.
Notosusanto, N. (1985). *Masalah penelitian sejarah kontemporer*. Inti Idayu Press.
Nora, P. (1989). Between memory and history: Les lieux de mémoire. *Representations, 26*, 7–24.
Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008). *Sejarah nasional Indonesia* (Edisi Pemutakhiran). Balai Pustaka.
Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Serambi.
Roosa, J. (2006). *Pretext for mass murder: The September 30th movement and Suharto's coup d'état in Indonesia*. University of Wisconsin Press.
Said, E. W. (1993). *Culture and imperialism*. Vintage Books.
Shiraishi, T. (1997). *Zaman bergerak: Radikalisme rakyat di Jawa 1912–1926*. Pustaka Utama Grafiti.
Soeharto. (1989). *Pikiran, ucapan, dan tindakan saya: Otobiografi Soeharto*. Citra Lamtoro Gung Persada.
Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
Storey, J. (2018). *Cultural theory and popular culture: An introduction* (8th ed.). Routledge.
Suryadinata, L. (2002). *Pemikiran politik etnis Tionghoa Indonesia 1900–2002*. LP3ES.
Trouillot, M. R. (1995). *Silencing the past: Power and the production of history*. Beacon Press.
Vickers, A. (2013). *A history of modern Indonesia*. Cambridge University Press.
Wood, E. J. (2003). *Insurgent collective action and civil war in El Salvador*. Cambridge University Press.
Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Adam, A. W. (2014). Meninjau kembali historiografi Indonesia pada masa Orde Baru. *Jurnal Sejarah, 24*(2), 115–130.
McGregor, K. E. (2001). Constructing the Indonesian nation through history. *Journal of Southeast Asian Studies, 32*(3), 325–350.
Purwanto, B. (2006). Gagalnya historiografi Indonesia-sentris?. *Humaniora, 18*(3), 245–255.
Sulistiyono, S. T. (2014). Historiografi Indonesia: Antara memori dan kekuasaan. *Paramita: Historical Studies Journal, 24*(1), 1–12.